

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada akhir perang dunia kedua kekuatan-kekuatan imperialis eropa seperti Prancis, Belgia, Belanda dan Inggris merasakan apa yang dirasakan oleh negara-negara jajahan mereka, yaitu diokupasi oleh negara asing atau dalam konteks ini Nazi Jerman. Dari pengalaman dalam perang dunia kedua memunculkan kesadaran pada publik dan pemerintah Prancis, Belgia, Belanda dan Inggris untuk melakukan apa yang disebut sebagai ‘dekolonisasi’ (proses dari negara koloni menjadi negara merdeka). Dari dekolonisasi yang terjadi dari pertengahan hingga akhir abad 20 melahirkan negara-negara baru di Afrika dan Asia seperti Kongo (1960), Namibia (1990), Zimbabwe (1980), Libya (1951), Indonesia (1945), Malaysia (1957), Vietnam (1945), Kamboja (1953), Laos (1953) dan negara-negara lainnya di Asia dan Afrika. Beberapa negara yang diberikan kemerdekaan oleh negara induknya memilih bergabung dengan organisasi persemakmuran yang dibentuk oleh mantan negara induknya.

Dengan terbentuknya ‘*Iron Curtain*’ (pembatas fisik yang membagi Eropa menjadi dua wilayah terpisah kapitalis di eropa barat dan komunis di eropa timur dari akhir Perang Dunia II pada tahun 1945 hingga akhir Perang Dingin pada tahun 1991.) dan ‘*Bamboo Curtain*’ (pembatas politik pada Perang Dingin antara negara-negara Komunis di Asia Timur, dan negara-negara kapitalis; dan non-Komunis di Asia Timur, Selatan dan Tenggara.), negara-negara yang baru lahir

tersebut diharuskan memilih untuk mengikuti kapitalis Amerika Serikat atau komunis Uni Soviet, dari hal tersebut banyak negara-negara di Asia dan Afrika yang mengalami perang saudara, seperti Ethiopia, Lebanon dan Angola.

Pasca runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991 yang sekaligus menandai berakhirnya perang dingin. Negara-negara yang tadinya merupakan bagian dari Uni Soviet memerdekakan diri, beberapa ada yang memilih untuk bergabung dengan Uni Eropa dan NATO (*North Atlantic Treaty Organization*) sedangkan yang lainnya bergabung dengan *Commonwealth of Independence State* (sebuah organisasi antar pemerintah regional di Eurasia dibentuk setelah pembubaran Uni Soviet). Dari proses dekolonisasi yang panjang tersebut menimbulkan masalah berkepanjangan yang baru seperti, perang saudara, nasionalisme, dan terorisme. Selain itu juga dunia Internasional dihadapkan bagaimana untuk berinteraksi dengan satu sama lain, dengan saling curiga atau berkerja-sama demi tujuan yang sama.

Setelah 8 tahun runtuhnya Uni Soviet, sekaligus 2 tahun menjabat sebagai Perdana Menteri dan satu tahun konflik di *Balkan Region*, Tony Blair pada 1999 pidato di Chicago mengangkat apa yang disebut sebagai '*liberal interventionist*' sebagai pendekatan untuk kebijakan luar negeri. Setelah satu dekade menyaksikan *Rwandan Genocide* dan *Ethnic Cleansing* di Bosnia. Dia menyebutkan hal tersebut merupakan sebuah kesalahan dari komunitas internasional yang seharusnya dapat mencegah kejadian tersebut. Periode pertama Tony Blair sebagai Perdana Menteri memandang bahwa perlu adanya intervensi dari Britania

Raya di Kosovo (*Kosovo War*) dan Sierra Leone (*Sierra Leone Civil War*).
(diterjemahkan oleh penulis)¹

Tony Blair mengurutkan beberapa negara yang gagal diintervensi yakni: Myanmar (*8888 Uprising* dan *September military coup and massacres*), Zimbabwe (*Gukurahundi*), Korea Utara (*Onsong concentration camp riot massacre*), Sudan (*Bor massacre* dan *Darfur genocide*), Lebanon (*October 13 massacre* dan *Qana massacre*).(diterjemahan oleh penulis)²

Hal yang paling dikritisi dari kebijakan luar negeri negara-negara barat ialah ditunjukkannya ‘standar ganda’, sebagai contoh, intervensi di Iraq (*Iraq Invasion of Kuwait*) tapi tidak di Sudan (*Darfur Genocide*). (diterjemahkan oleh penulis)³ Sebagai kritik ia mengatakan, “PBB terbentuk dari Perang Dunia Kedua. Setelah peristiwa *Holocaust* (genosida etnis yahudi oleh nazi german), orang-orang berkata ‘jangan lagi’, lalu kita memiliki Kamboja (*Cambodian genocide*), Rwanda (*Rwandan genocide*) dan Sudan.”(diterjemahkan oleh penulis)⁴

Tony Blair Memperingatkan tentang bahaya dunia yang terpisah kedalam *sphere of influence* (suatu negara atau wilayah yang negara lain memiliki kekuatan untuk mempengaruhi perkembangan walaupun tidak memiliki otoritas formal.) dan terbaginya fokus komunitas internasional kedalam isu terorisme dan isu kekerasan.(diterjemahkan oleh penulis)⁵

¹ Tony Blair, *A Global Alliance for Global Value* (London: The Foreign Policy Centre, 2006), hlm. 3

² *Ibid*, hlm. 3

³ *Ibid*, hlm. 4

⁴ *Ibid*, hlm. 4

⁵ *Ibid*, hlm. 4

Alasan saya mengambil pemikiran Tony Blair adalah karena pada era pasca-perang dingin, *sphere of influence* kembali terbentuk di dunia internasional. Dari *sphere of influence* bisa membentuk perjanjian aliansi militer di dunia internasional seperti *Entente Alliance* (Aliansi militer antara Russia, Prancis dan Britania Raya) dan *Triple Alliance* (Aliansi militer antara Jerman, Austria-hungaria dan Italia) pada perang dunia pertama, *Allies* dan *Axis* pada perang dunia kedua. Hal itulah yang menjadi perhatian dari Tony Blair.

Selain itu juga, karena keadaan global dan dunia internasional yang sudah berubah, MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) akan dimulai pada 2020 dan membuat kita sebagai bangsa dan negara harus merubah paradigma tentang negara lain dan bangsa lain, bukan lagi memandang mereka sebagai musuh yang wajib kita curigai, tapi sebagai teman yang bisa kita ajak kerja-sama baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya, sekarang bukanlah lagi saatnya untuk menjadi *xenophobe* (seseorang yang tidak suka atau berprasangka buruk terhadap orang-orang dari negara lain.) terhadap bangsa lain atau negara lain, sekarang bukan lagi tahun 40-50an yang kita merupakan negara yang baru berdiri dan masih memiliki trauma akan penjajahan dimasa lalu dan menaruh curiga terhadap bangsa lain dengan ketakutan mereka datang sebagai penjajah, masa itu sudah lewat dan sudah saatnya bagi kita untuk membuka lembaran baru dan menerima secara terbuka era globalisasi yang sudah terjadi.

Usulan penelitian ini akan meneliti tentang pemikiran Tony Blair mengenai internasionalisme. Internasionalisme merupakan prinsip politik yang melampaui

nasionalisme dan mengkehendaki sebuah kerjasama yang lebih besar dibidang politik atau ekonomi antara bangsa dan negara.

Selanjutnya, karena internasionalisme masih jarang dibahas di Indonesia baik di bidang pendidikan ataupun politik. Padahal, dimasa sekarang internasionalisme merupakan hal yang sangat penting karena kita sebagai bangsa dan negara tidak bisa hidup sendirian atau menjadi negara yang menganut *Isolationism* (Kebijakan nasional untuk menghindari keterlibatan politik atau ekonomi dengan negara lain.), Karena hingga hari ini kita masih saja mendengar tentang sentimen anti-bangsa asing, baik dunia maya ataupun dunia nyata, bahkan untuk rakyat Indonesia sendiri yang memang memiliki ikatan leluhur dari negara lain, sebagai contoh: etnis tionghoa. Tidak bisa dipungkiri bahwa kita membutuhkan bangsa dan negara lain, baik untuk Ekonomi, Politik, Sosial Budaya, IPTEK dan lain sebagainya, karena negara yang menutup diri terhadap dunia luar cenderung akan hancur dari dalam atau rawan terjadi konflik, sebagai contoh: jepang sebelum era restorasi meiji dan Amerika Serikat sebelum perang dunia pertama.

Khususnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi, masih belum ada yang membahas tentang internasionalisme ataupun pemikiran politik dari barat dimasa sekarang.

Hal yang ingin saya capai dari penelitian ini adalah bahwasannya, kita sebagai bangsa dan negara yang merupakan bagian dari komunitas internasional, untuk peduli dan bertindak tentang isu kekerasan dan terorisme yang sekarang ini merupakan isu yang sangat genting untuk diatasi oleh komunitas internasional dan

PBB itu sendiri sebagai organisasi yang mewadahi negara-negara yang ada di dunia. Komunitas internasional juga seharusnya memandang semua konflik yang terjadi secara sejajar, seperti yang dikritisi oleh Tony Blair bahwa di Iraq ada intervensi dari negara barat sedangkan di Sudan tidak.

Dengan usulan penelitian ini saya harap, saya mampu untuk memberikan penelitian yang berbeda dan mengembangkan khasanah keilmuan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang termuat pada latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan ditemukan dan dianalisa dalam tulisan ini lebih lanjut adalah:

1. Bagaimana pemikiran Tony Blair tentang internasionalisme khususnya dalam buku A Global Alliance for Global Values?
2. Bagaimana relevansi dari gagasan internasionalisme yang dikemukakan oleh Tony Blair terhadap negara-negara, masyarakat dunia dan Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pemikiran Tony Blair tentang internasionalisme khususnya dalam buku A Global Alliance for Global Values

2. Untuk mengetahui Tentang relevansi dari gagasan internasionalisme yang dikemukakan oleh Tony Blair terhadap negara-negara, masyarakat dunia dan Indonesia

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Strata Satu (S1) pada program studi Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi.
2. Bagi pembaca, sebagai sarana untuk mencari tahu gagasan tentang internasionalisme khususnya yang dikemukakan oleh Tony Blair